

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab sebelumnya, Maka ada beberapa hal pokok yang dapat di simpulkan oleh penulis sebagai berikut:

6.1.1 Relasi Kuasa yang bersifat Dominatif

Berdasarkan hasil analisis pada relasi kuasa yang bersifat dominatif dapat di simpulkan bahwa Kepala Desa di Desa Faturika sangat Dominatif dalam menetapkan program pembangunan sehingga banyak program yang diberikan tidak tepat sasaran dan dianggap tidak adil. Dampaknya masyarakat menjadi kecewa dan malas untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti: MusrembangDes maupun Mudes karena dianggap sebagai formalitas semata. Sikap dominasi kepala desa seakan didukung oleh BPD yang kurang memberikan pengawasan atau kontrol terhadap kinerja kepala desa. Ini dapat dilihat dari belum adanya pendekatan yang dilakukan BPD untuk memeriksa laporan keterangan mengenai kinerja kepala desa dan kegiatan laporan tahunan BPD, Kepala Desa dengan Masyarakat. hal ini menyebabkan masyarakat tidak bisa mengevaluasi kinerja kepala desa.

6.1.2 Relasi Kuasa yang bersifat Kolutif

Berdasarkan hasil analisis pada relasi kuasa yang bersifat kolutif dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa di Desa Faturika dan beberapa orang BPD yang diindikasikan berasal dari kelompok pro/pendukung Kepala Desa sama – sama

berkolusi dalam pengelolaan Kekayaan milik desa seperti: Traktor yang di beli menggunakan Dana Desa tetapi hanya dipake oleh Kepala Desa dan beberapa orang BPD untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menyebabkan fungsi BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa menjadi mudah untuk dimobilisasi karena BPD tidak memiliki pendirian sebagai lembaga perwakilan masyarakat

6.1.3 Relasi kuasa yang bersifat Konfliktual

Berdasarkan hasil analisis pada relasi kuasa yang bersifat konfliktual dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat dalam musyawara desa merupakan satu kesatuan yang dianggap wajar karena dari perbedaan pendapat tersebut dapat melahirkan suatu solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di desa. Namun terkadang antara Kepala Desa dengan BPD sama – sama mempertahankan ego masing – masing karena keduanya masih terbawa dendam politik praktis dalam pilkade.

6.1.4 Relasi Kuasa yang bersifat Kemitraan

Berdasarkan hasil analisis pada relasi kuasa yang bersifat kemitraan dapat disimpulkan bahwa: antara kepala desa dengan BPD tidak saling bermitra. Hal ini dapat dilihat dari tindakan kepala desa yang tidak melibatkan BPD dalam pembahasan peraturan desa tentang RAPBDes dan RKPBDes. Keterlibatan BPD dalam pembahasan peraturan desa sangat penting dimana BPD sebagai wakil masyarakat desa yang akan menyuarakan kepentingan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu kepala desa juga tidak memberikan

laporan tertulis kepada BPD dan tidak pernah menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat baik dalam berupa selebaran maupun disampaikan secara lisan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat saya sarankan hal – hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya pelatihan maupun pembinaan kepada BPD tentang tugas dan fungsi dari BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengabdian masyarakat sehingga kemitraan antara kepala desa dengan BPD benar – benar terlaksana dengan baik.
2. Perlu adanya mitra kerja yang baik antara kepala desa dengan BPD karena mitra kerja yang baik akan memberikan keberhasilan dalam menjalankan suatu tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan bersama.
3. Pemerintah Desa Fatmahanik dalam hal ini kepala desa perlu melibatkan BPD dalam rapat penetapan RKP Desa dan RAP Desa dan wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD. Oleh karena itu perlu adanya kemitraan antara kepala desa dengan BPD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Bertens, K. Filsafat Barat Kontemporer Prancis, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Moleong Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Michel Foucault, Pengetahuan dan Metode, Karya-Karya Penting Foucault, Yogyakarta: Jalasutra, 2011.

Muji Sutrisno, Hendar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 2005)

Nawawi, H. Hadari. 1983. Metode Penelitian Bidang Social.

Nanang Martono. 2015. Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan poskolonial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Widjaja. 2005. Otonomi Desa. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Zainudin, A. Rahman. Kekuasaan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Jurnal :

Ayu Novita, Relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, 2014

AlfiHerdyMomongan, Relasi Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Suatu Studi Di Desa Pinaling Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan), 2016

Fajar Sidik, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta, 2015).

Hastowiyono.2012. Kemandirian Desa, keberlangsungan Hidup dan Pembaharuan Desa.

MujiSutrisno, HendarPutranto, Teori-TeoriKebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

Rosida, Ahmad “Mekanisme Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) di Tinjau dari Undang-undang omor 6 tahun 2014 tentang Desa “jurnal ilmiah rinjani tahun 2015, volume.6, nomor 1

Skripsi Aviandri aldo, “ Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Desa” (studi kasus pada desa sukoharjo kecamatan kayen kabupaten kediri) di akses pada tanggal 28 november 2018.

Sutaro Eko, dkk, “ Desa Baru Negara Lama”

Undang-UndangNomor 6Tahun 2014

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 55

Wardoyo, Hasto. 2015. Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes.